

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara = Authority of Mineral And Coal Mining Management After The Enactment Of Law No. 3 of 2020 On The Amendment To Law Number 4 of 2009 On Mineral And Coal Mining

Rifcky Amarthya Ardiatama Utomo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521605&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan mengkaji dan membandingkan perkembangan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada "Hak Menguasai Negara" dan bertujuan untuk mewujudkan manfaat "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" sebagai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa disharmonisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 2014 telah diselaraskan oleh UU No. 3 Tahun 2020 melalui perubahan konsep kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi Sentralisasi dengan mengakomodir Dekonsentrasi berdasarkan diskresi Pemerintah Pusat. Meskipun demikian Pemerintah tetap disarankan untuk mempercepat tindak lanjut pembentukan Perangkat Daerah yang mengurus pertambangan mineral dan batubara serta mengawal secara penuh proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan.

.....The following thesis discusses the Government's authority in managing the mining of mineral and coal after the enactment of Law No. 3 of 2020 and its implementing regulations. The research was conducted in a juridical-normative manner by reviewing and comparing the development of laws and regulations, especially in the mineral and coal mining sector. The management of mineral and coal mining is based on the "State Controlling Right" and aims to realize the benefits of "the greatest prosperity of the people" as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Through this research, the disharmonization issue between Law No. 4 of 2009 with Law No. 23 of 2014 has been resolved by Law No. 3 of 2020 by implementing changes in the concept of authority for managing mineral and coal mining to become Centralized by accommodating Deconcentration based on the discretion of the Central Government. However, it is strongly advised that the Government needs to accelerate the formation of Regional Apparatus that manages mineral and coal mining and fully oversees the process of transferring Mining Business Permits.